

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Qur'an UII. 1991. *Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press
- Adjie, Habib. 2013. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- _____. 2011. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Atmaja, I Dewa Gede., I Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: UNPAM Press.
- Black, Henry Campbell. 2014. *Black's Law Dictionary*. 10th edition. Boston: Thomson West Publishing.Co.
- Makarim, Edmon. 2013. *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Manullang, E. Fernando M. 2017. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.
- Nurita, Emma. 2012. *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama.
- R. Ridwan H. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sidiq, Saripudin. 2014. *Ushul Fiqh*. Cet. Ke-2. Jakarta: KENCANA.
- Sjawie, Hasbullah F. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*. Cet. Ke-2. Jakarta: Kencana.
- Suranta, Ferry Aries. 2010. *Peran PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Syakur, Syahrijal. 2021. *Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Penyidikan Tindak Pidana Asalnya Dilakukan Penyidik Lain*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Trijono, Rachmat. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti
- Tim Pelaksana Penilaian Resiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021. 2021. *Penilaian Resiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Tutik, Titik Triwulan. 2015. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet. Ke-5. Jakarta: PRENADAMEDIA Group.
- Unger, Brigitte, dkk. 2006. *The Amounts nad The Effects of Money Loundering*. Utrect: Utrect School of Economy.
- Widiyastuti, Y. Sari Murti. 2020. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Wiyono, R. 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Cet Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yustiavandana, Ivan. 2014. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Jakarta: Rajawali Press.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, 21 April 2008.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5709, 23 Juni 2015.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

Peraturan Lainnya

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6490, 20 April 2020.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6491.

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015

- Putusan Pengadilan Negri Bengkulu Nomor 64/PID.Sus.TPK/2016/PN.BGL.
Surat Edaran Nomor AHU.UM.01.01-1232 tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.
- Surat Edaran Nomor AHU.UM.01.01-1239 tentang Panduan Pengawasan Kepatuhan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Pelaporan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Bagi Notaris
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/SEOJK.04/2022 Tentang Cara Permohonan Persetujuan Sebagai Penyedia Sistem Penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (e-RUPS), 24 Januari 2022, 3.

Sumber Lainnya (Jurnal, Makalah, Prceeding)

- Aditya, Adrian., Agita Chici Rosdiana. 2021. Peran Notaris dan Keabsahan Akta RUPS yang Dilakukan Secara Elektronik (Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2022 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Indonesian Notary Vol. 3 No. 2*, 2021.
- Ainullah. 2017. Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum (*Utilitarianisme*) Dalam Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan. *Jurnal Studi Keislaman Ulumuna*, Vol. 3, No.1 2017.
- Ardiano, Chandra., Pujiyono, Nur Rochaeti. 2022. Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Elektronik Bitcoin Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang. *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 11 No. 1, 2022.
- Arifin, Ridwan., Shafa Amalia Choirinnisa. 2019. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, Vol. 12, No. 1, 2019.
- Baureh, Modi Gregorian. 2013. Pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Proses Legislasi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian Undang-Undang. *Tesis*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Pascasarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013.
- Bustaman, Andita Hadi Permana. 2023. Jabatan Notaris dan Fungsi Dewan

- Kehormatan Notaris. *Jurnal Pro Hukum Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol. 12, No.1, Januari 2023.
- Chaerunnisa, Dheanda., Anggun Lestari Suryamizon dan Mahlil Adriaman. Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya. *Sakato Law Jurnal*, Vol. 1, No. 1, Januari 2023.
- Djanggih, Hardianto., Nurul Qamar. 2018. Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Cyber. *Jurnal Pandecta*, Vol. 13, No 1, Juni 2018.
- Dyani, Vina Akfa. 2017. Pertanggung Jawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte. *Lex Renaissance*, Vol. 2 No. 1, Januari 2017.
- Fatmawati, Nur Aini. 2020. Kekuatan Pembuktian Digital Signature Pada Akta Yang Dibuat Oleh Notaris. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 4, No. 2, Agustus 2020.
- Hanum, Susan Rianti., Yu Un Oppusunggu, Mohamad Fajri Eka Putra. 2022. Pertanggungjawaban Notaris Atas Pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3078 K/PDT/2016). *Indonesian Notary*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Haryanto, Agus Dwi. 2023. Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Surat Kuasa Menjual. *Jurnal Bevinding Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta*, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Hindra, Innaka Dewi. 2019. Penerapan Asas Praduga Sah Terhadap Akta Notaris Dengan Adanya Figur Palsu (Studi Kasus Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 43/PDT/2017/PT.BNA). *Indonesian Notary Jurnal*, Vol. 1, No. 4, 2019.
- Ilham, Ridho., Elwi Danil, Yoserwan. 2020. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Swara Justisia: Universitas Eka Sakti*, Vol. 3 Issue 4.
- Irfani, Nurfaqih. 2020. Asas Lex Superior, Lex Specialis dan Lex Posterior:

- Pemaknaan, Problematika dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 3, September 2020.
- Iriantoro, Agung. 2019. Upaya Preventif Notaris Dalam Membuat Akta Agar Terhindar Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal SELISIK*, Vol. 5, No. 2, Juni 2019.
- Ismail, Ermanto Fahamsyah, I Gede Widhiana Suarda. 2021. Kewajiban Notaris Menngenal Pengguna Jasa Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Korporasi. *Jurnal Sintax Idea*, Vol. 3, No. 10, Oktober 2021.
- Iqbal, Muhammad. 2022. Kepastian Hukum Akta e-RUPS berdasarkan Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo. *Jurnal Reportorium: Universitas Sriwijaya*, Vol. 11, No 1, Mei 2022.
- Junizar, Rizky Firji. Keabsahan Pernyataan Keputusan Rapat Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Di Bawah Tangan: Sturi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1860 K/PID/2010. *Tesis, Universitas Indonesia Library*.
- Lasmadi, Suhari., Elly Sudarti. 2021. Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Vol. 5, No. 2, April 2021.
- Lawa, Ricky Wir. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Menjalankan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa. *Jurnal Proyuris*, Vol. 3, No. 1, April 2021.
- Maheswara, Ravi Hafids. 2023. Landasan Hukum e-RUPS dan Pembuatan Risalah Rapat e-RUPS Di Indonesia. *Jurnal Education and Development: Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol 11, No 1, Januari 2023.
- Mandala, Marthinus Mesak. 2021. Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Bagi Notaris Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 09 Tahun 2017. *Officium Notarium*, Vol 1, No. 2, Agustus 2021.
- Merliyani, Dwi., Annalisa Yahanan, Agus Trisaka. 2020. Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber

- Notary. *Jurnal Reportorium: Universitas Sriwijaya*, Vol. 9, No. 1 Mei 2020.
- Muda, Iskandar. 2021. Undang-Undang Jabatan Notaris, Perubahan dan Penjelasan dalam Satu Naskah Beserta Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait, Revisi 2.
- Muslih, M. 2013. Negara Hukum Indonesia Dalam Prespektif Teori Hukum Gustav Radbruch. *Jurnal Legalitas*, Vol. IV, No. 1, 2013.
- Ohoitumur, Yong. 2001. Tujuh Teori Etika Tujuan Hukum. *Studia Philosophica Et Theologica*, Vol. 1 No. 2, 2001.
- Oktaviany, Cindy., Muhammad Hadin Muhjad, Diana Haiti. 2022. Asas Mengenali Pengguna Jasa Notaris Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Jabatan Notaris. *Banua Law Review: Lambung Mungkarat University*, Vol. 4, Issue. 1, April 2022.
- Pangesti, Shinta. Akta PKR dari RUPS Luar Biasa yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Yuridis*, Vol. 13, No. 3, Desember 2020,
- Prakoso, Andria Luhur. Prinsip Pertanggungjawaban Perdata dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Prosiding Seminar.
- Pramudyo, Eri. 2021., Ranti Fauza Mayana, Tasya Safiranita Ramli. 2021. Tinjauan Yuridis Penerapan *Cyber Notary* Berdasarkan Prespektif UU ITE dan UUJN. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 8, Agustus 2021.
- Rahman, Fathor. 2020. Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam. *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2020.
- Rahman, Fikri Ariesta. 2018. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap. *Jurnal Lex RENAISSANCE*, Vol. 3 No. 2, Juli 2018.
- Rizkianti, Wardani. 2016. Akta Otentik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Telekonferensi (Mekanisme Pembuatan dan Kekuatan Pembuktiannya). *Jurnal Yuridis*, Vol. 3 No. 1, 2016.
- Saffanah, Annisa Bella., Wardani Rizkianti. 2021. Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Notaris Akibat Penyalah Gunaan Keadaan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal*

Standing, Vol. 5, No. 1, Maret 2021.

Syafe'I, Zakaria. 2014. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam.

Jurnal AlQolam, Vol. 31, No.1, Januari-Juni 2014.

Tan, David. 2021. Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Jurnal Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 8, 2021.

Internet

Ananda, Ghansam. 2023. "Jenis-Jenis Akta Yang Dibuat Notaris". dikutip dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-akta-notaris-cl1996#_ftn1, diakses pada tanggal 16 April 2023 Pukul 14:51

Alfa, Mawar dan Putri. 2019. "Netralisasi Pelaku Pasif dalam TPPU". dikutip dari https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/960/netralisasi-pelaku-pasif-dalam-tppu-.html, diakses pada 18 April 2023 Pukul 00.21

Divisi Sekretaris Perusahaan, Komunikasi dan Edukasi. 2021. "Berita Pers: Investor Kini Dapat Ikut RUPS Secara Online". dikutip https://www.ksei.co.id/files/uploads/press_releases/press_file/id-id/197_berita_pers_investor_kini_dapat_ikut_rups_secara_online_20210630231205.pdf, diakses pada tanggal 28 Februari 2023 pukul 14:45.

Hidayah, Ayyi. 2022. "Perhatian, Bukalapak mau RUPSLB! Inverstor Kasta Ini Bisa Usul". dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221024102431-17-381994/perhatian-bukalapak-mau-rupslb-investor-kasta-ini-bisa-usul>, diakses pada tanggal 24 Januari 2023 Pukul 14:08.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikutip dari <https://kbbi.web.id/administrasi>, diakses pada tanggal 25 April 2023 pukul 03: 19 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikutip dari <https://kbbi.web.id/administratif>, diakses pada tanggal 25 April 2023 pukul 03:13 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikutip dari

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas>, diakses pada tanggal 28 Februari 2023 pukul 14.18.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/legalitas>, diakses pada tanggal 23 April 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pejabat>, diakses pada tanggal 23 April 2023 Pukul 23:21 WIB

Kanwil Babel. 2021. “Kadiviyankumham dan Tim Subbid AHU Babel Penuhi Undangan Ikatan Notaris Indonesia Se-Pulau Belitung Untuk Sosialisasikan Kebijakan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris Se-Pulau Belitung”. dikutip dari <https://babel.kemenkumham.go.id/berita-utama/kadiviyankumham-dan-tim-subbid-ahu-babel-penuhi-undangan-ikatan-notaris-indonesia-se-pulau-belitung-untuk-sosialisasikan-kebijakan-penerapan-prinsip-mengenali-pengguna-jasa-pmpj-bagi-notaris-se-pulau-belitung>, diakses pada tanggal 10 April 2023

Kanwil Kalteng. 2023. “Dukung Indonesia Jadi Anggota FATF, Notaris Wajib Laporan SRA”. dikutip dari <https://kalteng.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/18691-dukung-indonesia-jadi-anggota-fatf-notaris-wajib-lapor-sra>, diakses pada tanggal 16 April 2023

Lubis, Ikhsan. 2020. “RUPS Elektronik”, dikutip dari https://medianotaris.com/rups_elektronik_berita690.html. Diakses pada tanggal 24 Januari 2023 Pukul 14:02.

PPATK. 2021. “Sinergi Penyidik Sipil dan Pihak Pelapor”. dikutip dari <https://www.ppatk.go.id/news/read/1163/sinergi-penyidik-sipil-dan-pihak-pelapor.html> diakses Pada 30 April 2023 Pukul 14:00 WIB